

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA DALAM ERA OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN SIJUNJUNG

Oleh Y u n a n i

(Dibawah bimbingan DR. Azwar, MSi dan DR. Erwin, Msi)

Abstrak

Secara prinsip tujuan utama otonomi daerah adalah mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya, seharusnya dengan Desentralisasi Program Keluarga Berencana akan makin berhasil, dan kontrol masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah Pemerintah Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh implementasi pelaksanaan Otonomi Daerah pada program Keluarga Berencana di Kabupaten Sijunjung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : 1. Faktor-faktor yang menyebabkan belum maksimalnya pelaksanaan program KB sehingga tidak berkontribusinya peserta KB dalam penurunan Total Fertility Rate (TFR) di Kabupaten Sijunjung.; 2. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sijunjung pada pengelolaan Program KB guna menurunkan TFR dalam era otonomi daerah

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pelayanan publik dari Rondinelli dan Cheema, teori kinerja birokrasi David Osborne dan Peter Plastrik dengan formula analoginya sistem pemerintah sebagai organisme yang dibentuk oleh DNA serta teori kebijakan publik sistem ukuran kinerja dari Mardiasmo dan Bastian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pada kurun waktu 5 tahun Program KB belum berjalan maksimal, ditemukan masih banyaknya kendala di lapangan. Setelah dianalisis ternyata ditemukan tiga penyebab : Pertama, bahwa dilihat dari Input Kondisi yang mempengaruhi tidak maksimalnya pelaksanaan program KB sehingga tidak berkontribusinya peserta KB dalam penurunan Total Fertiliti Rate (TFR) adalah serba terbatasnya sarana-prasarana, kurangnya dana operasional, kurangnya tenaga baik tingkat SKPD maupun penyuluh Lapangan KB, terbatasnya jenis pilihan dan ketersediaan alat kontrasepsi, tidak optimalnya peran petugas KB di lapangan, tidak jalannya mekanisme operasional pembinaan Institusi Masyarakat pedesaan dan pembinaan peserta KB. Kedua, bahwa dilihat dari prosesnya masih banyaknya faktor-Faktor yang mempengaruhi belum maksimalnya pelaksanaan program KB di Kabupaten Sijunjung dengan faktor 1) Rendahnya kinerja birokrasi 2) Persepsi keluarga dalam memilih metode kontrasepsi cenderung pada kontrasepsi Non Jangka panjang (Non MKJP) , 3) Rendahnya faktor kualitas sarana pelayanan KB, dengan indikator rendahnya kualitas pelayanan KB (Service), minimnya pilihan dan macam ketersediaan metode kontrasepsi, dan masih tingginya faktor hambatan budaya 4) Tidak jalannya faktor penyampaian KIE dan Konseling karena tidak optimalnya peran PKB dan IMP. Ketiga , bahwa dilihat dari hasilnya semua target dan sasaran pencapaian peserta KB tercapai, namun pencapaian KB baru dan pembinaan peserta KB aktif tidak berdampak pada penurunan Total Fertiliti Rate (TFR) atau pun penurunan laju pertumbuhan penduduk (LPP).

Dengan demikian, saran-saran yang direkomendasikan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Keluarga Berencana kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung untuk diambil beberapa tindakan dalam rangka merespon dan mengakomodasi realitas tersebut, yaitu

: Pertama, perlu dilakukan kaji ulang dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan program KB, mulai dari proses perencanaan sampai tahap selanjutnya, perlu komitmen yang tegas eksekutif dan Legislatif, dalam pembentukan lembaga SKPD KB perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam dari segala aspek secara lebih komprehensif dan objektif. Kedua, penetapan tugas pokok dan fungsi SKPD perlu dilakukan kajian yang mendalam, sesuai dengan beban tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah, kemampuan anggaran dan pembiayaan, keterkaitan Kabupaten, Provinsi dan Lembaga negara Yang menangani di Pemerintah Pusat, sehingga anggaran, sarana prasarana mengikuti beban tugas pada SKPD, Sesuai dengan Norma, standar, Prosedur dan kriteria (NSPK) dan Standar pelayanan Minimal (SPM). Ketiga, perlu transparansi dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi organisasi, perlunya diakomodasi kewajiban transparan serta diikuti dengan berbagai konsekuensi dan peningkatan budaya kerja birokrasi. Keempat, perlu upaya mewujudkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat dengan perbaikan organisasi birokrasi, Revitalisasi dan reorientasi, serta adanya kepastian biaya pelayanan.

IMPLEMENTING THE POLICY OF ORGANIZING OF FAMILY PLANNING PROGRAM IN THE AUTONOMY REGULATION ERA OF SIJUNJUNG REGENCY

By : Y U N A N I

Supervised by DR. Azwar, MSi and DR. Erwin, MSi

Abstract

Principally, the main aim of autonomy regulation is to carry out the government service closer to the community, by the decentralization, family planning program should achieve better result and the community control to the government becoming stronger and reliable.

This research has been done in Sijunjung Regency, West Sumatera Province. Qualitative method has been chosen to analyses the result following the case study. Meanwhile, the object of the research is the Government of Sijunjung Regency. The proposed of the research is to understand the influence of applying the autonomy regulation to the family planning program in Sijunjung Regency. The goals of the research are to understand and analyses: 1) the key factor that causing the delay of maximum result of family planning program, as a result there is no contribution of family planning member for reduction of Total Fertility Rate (TFR) in Sijunjung Regency. 2) The strategy of The Government of Sijunjung Regency in organizing of family planning program to reduce the TFR in autonomy regulation.

The basic theory that is used in this research are: 'public service theory' from Rondineli and Cheema, 'bureaucratic effort theory' by David Osborne and Peter Plastrik with the analogy formula of government system as organism formed by DNA, also from public policy theory which is 'effort measuring system' introduced by Mardiasmo and Bastian.

The result shows that the implementation of the policy of family planning during last 5 years period is run not smoothly, it is found that there are still many problems occur in the field. There are three factors causing these problems: Firstly, the main problem found in the field causing the delay of maximum result of family planning program to TFR are: lack of infrastructure, lack of budget, lack of capability staff, lack of choice of contraception availability, less action of family planning adviser in the field, there is no mechanism of advising the villager institution in guiding the family planning member. Secondly, from processes point of view, there are still many factors affected family planning program progress, 1) less effort of bureaucracy, 2) Family thought in choosing the method of short term

contraception (non MKJP), 3) low quality of family planning service, lack choice of contraception availability and also problem with culture contradiction, 4) there is no progress of KIE factor and counseling because less optimum of PKB and IMP. Thirdly, base on the result of the achieved target of family planning, the program is success, however new family planning program and guidance of active family planning member does not give an effective effect of reducing of Total Fertility Rate (TFR) or reducing of population growth (LPP).

Therefore, suggestions could be raise in order to optimize the application of family planning program in Sijunjung Regency to boost the progress of the program in related to responds and accommodate the reality of the conditions, which are: Firstly, it is urgent to review and reevaluate the applying and organizing the family planning program, planning and operation processes of the program, high commitment of executives and legislative, comprehensive and objective study are needed in order to form the institution of family planning department. Secondly, Authorisation the main task and responsibility of the family planning institution need comprehensive study based on task load, funding support, the relationship between local government, provincial government and central government, as a result infrastructure, budget support will acceptable with the task load, follow the norm, standard, procedure and criterion (NSPK) and minimum service standard (SPM). Thirdly, open management is needed in related to apply the main task and function of organization followed by improvement of working habit of bureaucracy. Fourthly, consider of improvement efficiency service to the community by fixing the bureaucracy organization, revitalization, also the reliable of service cost.